

**KEBIJAKAN REALOKASI ANGGARAN SEBAGAI  
PEMODERASI DETERMINAN KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH: STUDI PADA KABUPATEN DAN  
KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi  
(S.Akun)



Oleh:

**KHAULA IQLIMA ZUMAROH**

**NIM: 4318020**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022**

**KEBIJAKAN REALOKASI ANGGARAN SEBAGAI  
PEMODERASI DETERMINAN KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH: STUDI PADA KABUPATEN DAN  
KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi  
Syariah (S.Akun)



Oleh:

**KHAULA IQLIMA ZUMAROH**

**NIM: 4318020**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khaula Iqlima Zumaeroh

NIM : 4318020

Judul Skripsi : **Kebijakan Realokasi Anggaran sebagai Pemoderasi  
Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah:  
Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun  
2020**

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya [penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebtkan sumbernya. Demikian pernyataan penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Maret 2022

Yang menyatakan,



Khaula Iqlima Zumaeroh

## NOTA PEMBIMBING

**Novendi Arkham Mubtadi, M.Akun**

Desa Ciberung Rt 2 Rw 3, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Khaula Iqlima Zumaeroh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bismis Islam

c.q. Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini Saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Khaula Iqlima Zumaeroh

NIM : 4318020

Judul Skripsi : **Kebijakan Reallocating Anggaran sebagai Pemoderasi  
Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah:  
Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 8 Maret 2022  
Pembimbing,



**Novendi Arkham Mubtadi, M.Akun**  
NIP. 19891103 201908 1 001



### PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : Khaula Iqlima Zumaeroh  
NIM : 4318020  
Judul Skripsi : Kebijakan Realokasi Anggaran sebagai Pemoderasi Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2020

Telah diujikan pada hari Kamis dan Jum'at tanggal 7 - 8 April 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Dewan Penguji,

Penguji I

M. Nasrullah, M.S.I  
NIP. 198011282006041003

Penguji II

Ria Anisatus Sholihah, M.S.A  
NIP. 198706302018012001

Pekalongan, 22 April 2022



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hc Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H  
NIP. 197502201999032001

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sugiarto dan Ibu Nurkhikmah, yang telah selalu mendoakan, mendidik, mensupport dan memberikan yang terbaik serta tempat berbagi dalam cinta dan kasih sayang;
2. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Pekalongan sekaligus selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA);
3. Bapak Novendi Arkham Muftadi, M.Akun selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bsnis Islam atas semua ilmu pengetahuan yang telah diberikan;
5. Teman – teman almamater jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonom dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan
6. Sahabat terkasih: Elda, Nilam, Winda yang selalu bersedia mendengar keluh kesah saya, yang selalu menyemangati dan menghibur dikala duka. Semoga persahabatan kita kekal selamanya, amiin;
7. Teman-teman KKN Desa Batusari, Sirampog, Brebes 2021 yang telah menemani dalam suka-duka serta memberikan banyak pengalaman berharga;
8. EXO: Xiumin, Suho, Lay, Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O, Kai dan Sehun yang selalu memotivasi dan menghibur lewat karya-karyanya;

9. dan kepada diri sendiri, yang telah percaya pada diri sendiri, yang telah bekerja keras selama ini, yang tidak pernah berhenti hingga sampai di titik ini. Tetap semangat untuk diriku!!!

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat serta menambah pengetahuan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan.

Pekalongan, 8 Maret 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters that appear to be 'KI' followed by a flourish, all underlined with a single horizontal stroke.

Khaula Iqlima Zumaeroh

## **MOTTO**

*Everyone experiences happiness and sadness, but you should turn your happiness  
into gratitude and your sadness into patience*

Ikrimah Al-Barbari (ra)

*Don't worry about the end if you haven't even started*

Ooh Sehun (EXO)

## **ABSTRAK**

### **ZUMAEROH, K.I. Kebijakan Realokasi Anggaran sebagai Pemoderasi Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2020.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa determinan kinerja keuangan pemerintah daerah. Indikator yang digunakan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP) dan Belanja Daerah (BD) dengan penambahan kebijakan realokasi anggaran sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data sekunder, yakni dari APBD Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2020 yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sampel yang digunakan yakni 35 pemerintah daerah, yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota di Jawa Tengah. Metode analisis data menggunakan uji analisis regresi moderasi (MRA) dengan bantuan SPSS 26. Hasil uji t menunjukkan bahwa PAD bukanlah determinan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan DP dan BD merupakan determinan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari hasil uji analisis regresi moderasi (MRA) menghasilkan bahwa kebijakan realokasi anggaran merupakan pemoderasi pengaruh PAD dan BD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, tetapi bukan merupakan pemoderasi pengaruh DP terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: kinerja keuangan pemerintah daerah, PAD, DP, BD dan kebijakan realokasi anggaran

## ABSTRACT

### **ZUMAEROH, K.I. Budget Reallocating Policy as The Moderator of Determinants Financial Performance of Local Government: Studi at Regencies and Cities in Central Java in 2020**

The purpose of this study is to analyze the determinants of local government financial performance. The indicator used are local own revenue, balancing fund and local expenditure, with the addition of a budget reallocating policy as a moderator. This research is a quantitative research with secondary data sources, namely from the regional and city revenues and expenditures budgets in Central Java in 2020, which were obtained from the website of The Direktorat General of Fiscal Balance of The Ministry of Finance of The Republic of Indonesia. Sample in this research is 35 local government, which consist of 29 districts and 6 cities in Central Java. Data analyze in this research conducted by using moderate regression analysis with the help of SPSS 26. Based on analyze, pulled conclusion that: local own revenue is not a determinant of local government financial performance while balancing funds and regional expenditures are determinants of regional government financial performance. From the result of the moderating regression analysis, it was found that the budget reallocating policy was a moderating of the effect of local own revenue (PAD) and local expenditures on the financial performance of local governments, but not a moderating of the effect of balancing fund on the financial performance of local governments.

Keywords: local government financial performance, local own revenue, balancing fund, local expenditure and budget reallocating policy.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sugiarto dan Ibu Nurkhikmah, yang telah selalu mendoakan, mendidik, mensupport dan memberikan yang terbaik serta tempat berbagi dalam cinta dan kasih sayang;
2. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Pekalongan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
3. Bapak Novendi Arkham Muftadi, M.Akun selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bsnis Islam atas semua ilmu pengetahuan yang telah diberikan;
5. Teman – teman alمامater jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonom dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan
6. Sahabat terkasih: Elda, Nilam, Winda yang selalu bersedia mendengar keluh kesah saya, yang selalu menyemangati dan menghibur dikala duka. Semoga persahabatan kita kekal selamanya, amiin;
7. Kawan – kawan yang telah sangat berjasa untuk penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat pennulis sebutkan satu per satu;
8. EXO: Xiumin, Suho, Lay, Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O, Kai dan Sehun yang selalu memotivasi dan menghibur lewat karya-karyanya;
9. dan kepada diri sendiri, yang telah percaya pada diri sendiri, yang telah bekerja keras selama ini, yang tidak pernah berhenti hingga sampai di titik ini. Tetap semangat untuk diriku!!!

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat serta menambah pengetahuan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan.

Pekalongan, 8 Maret 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters that appear to be 'KI' followed by a flourish, all underlined with a single horizontal stroke.

Khaula Iqlima Zumaeroh

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Pembahasan .....	11
BAB II .....	13
LANDASAN TEORI.....	13
A. Landasan Teori .....	13
B. Telaah Pustaka .....	25
C. Pengembangan Hipotesis.....	33
D. Model Penelitian.....	39
BAB III.....	40
METODOLOGI PENELITIAN .....	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	40

B. Penarikan Sampel .....	40
C. Sumber Data .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Definisi Operasional Variabel.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	46
<b>BAB IV .....</b>	<b>51</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Hasil.....	51
B. Pembahasan .....	66
<b>BAB V.....</b>	<b>82</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Simpulan .....	82
B. Keterbatasan Penelitian .....	83
C. Implikasi Penelitian .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
Lampiran 1. Proporsi Pendapatan Daerah Tahun 2020.....	I
Lampiran 2. Indeks Kemandirian Fiskal Tahun 2020 .....	III
Lampiran 3. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 .....	IV
Lampiran 4. Dana Perimbangan Tahun 2020.....	VI
Lampiran 5. Belanja Daerah Tahun 2020 .....	VII
Lampiran 6. Belanja Tidak Terduga Tahun 2020.....	IX
Lampiran 7. Data Penelitian .....	X
Lampiran 8. Tabel t .....	XI
Lampiran 9. Daftar Riwayat Hidup Penulis .....	XIII

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

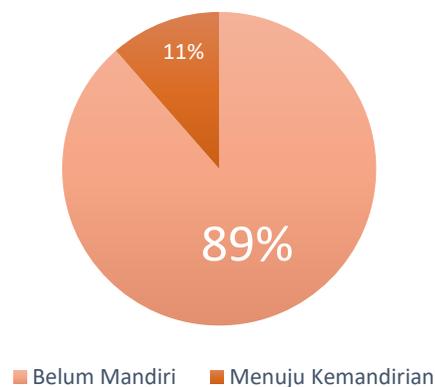
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota selaku kepala daerah memegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Implementasi kebijakan fiskal di daerah tentunya takkan terlepas dari perlunya kerjasama serta sinkronisasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan antara pusat dan daerah. Lingkup wilayah kekuasaan pemerintah daerah (Pemda) yang lebih kecil, diharapkan bisa memaksimalkan kinerjanya terutama dalam kegiatan perekonomian agar tercapai kesejahteraan yang merata. Kinerja keuangan pemda menjadi satu diantara faktor kunci keberhasilan negara dalam menjamin kualitas pelayanan publik dan tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja ini dapat diukur dari sisi keuangan. Kinerja keuangan diukur dengan membandingkan rancangan kerja dengan realisasi pelaksanaannya (Putri & Darmayanti, 2019).

Pengukuran kinerja keuangan pemda salah satu caranya melalui indeks kemandirian fiskal (IKF). Indeks kemandirian fiskal merupakan alat ukur kinerja keuangan dengan berfokus pada kemampuan daerah untuk membiayai kegiatannya tanpa transfer dari luar pemda (BPK, 2020). Melihat hasil reviu BPK dalam ringkasan eksekutif laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2020, mayoritas pemda di Indonesia masuk dalam kategori “belum mandiri”, yakni 443 dari total 503 daerah.

Jawa Tengah menjadi satu dari 34 provinsi di Indonesia yang mengemban fungsi menjadi roda penggerak perekonomian nasional. Berdasarkan laporan hasil

pemeriksaan BPK tahun 2020, hanya 4 Kab/Kot di Jawa Tengah yang berhasil masuk terkategori “menuju kemandirian”. Sisanya, 31 pemda tersebut masih terkategori “belum mandiri”. Berikut proporsi hasil review BPK pada Kab/Kot di Jawa Tengah tahun 2020 berdasarkan kategori IKF:

**Indeks Kemandirian Fiskal (IKF)  
Pemda Se-Jateng Tahun 2020**



Gambar 1.1 Proporsi kategori IKF Pemda Kab/Kot di Jawa Tengah

Gambar 1.1 diatas menerangkan bahwa mayoritas Pemda Kab/Kot di Jawa Tengah didominasi oleh kategori “belum mandiri”. Sebesar 89% masih terkategori “belum mandiri” dan hanya 11% yang berhasil *level up* “menuju kemandirian”. Empat pemda yang sudah berada ditingkat “menuju kemandirian” yaitu Kota Tegal, Semarang, Surakarta dan Magelang. Keempat Kota tersebut mendapat skor IKF diatas 0,25. Yang dimaksud “belum mandiri” disini yaitu daerah masih berpangkutangan kepada bantuan dana dari luar daerahnya dalam membiayai kegiatan di wilayahnya. Hal tersebut tentunya perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui sumber masalahnya. Melalui kajian tersebut maka bukan tidak mungkin, semua pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah bisa mencapai kategori “mandiri”. Daerah yang telah mandiri

tentunya akan meringankan beban pemerintah pusat khususnya terkait pendanaan atau anggaran.

Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi satu dari beberapa indikator kemandirian suatu daerah, maka dari itu PAD patutnya menjadi *main source* dalam urusan pendanaan daerah. Tingginya pendapatan daerah yang bersumber dari PAD bisa menjadi pertanda bahwa daerah tersebut mengalami progress ekonomi yang baik (Marpaung, 2019). Realitas mengatakan bahwa daerah lebih sering mengabaikan eksplorasi PAD agar menjadi dominasi dalam postur pendapatan daerahnya, dan menjadikan dana perimbangan sebagai penggantinya.

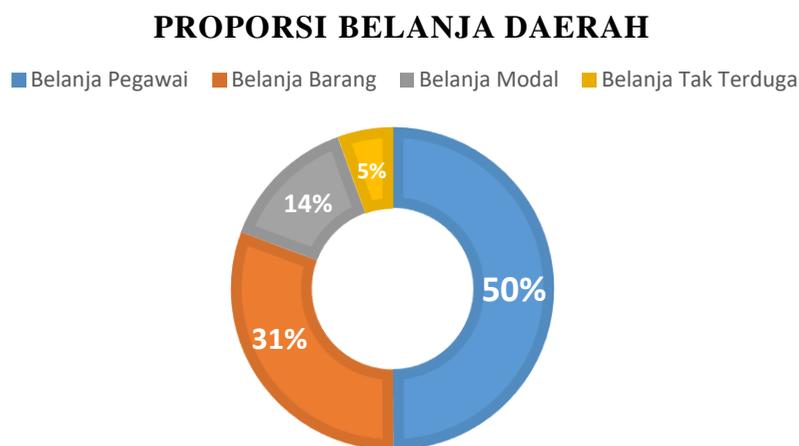
Baerdasarkan laporan realisasi anggaran (LRA) tahun 2020, diketahui bahwa rata-rata proporsi PAD pada laporan keuangan Pemda Kab/Kot Jawa Tengah berada dibawah 20% dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Hanya 6 pemda Kabupaten dan Kota yang berada diatas proporsi 20%. Keenam pemda tersebut yakni, Kota Magelang (26,6%), Kota Pekalongan (26,9%), Kota Salatiga (22,3%), Kota Semarang (43,3%), Kota Surakarta (22,5%), dan Kota Tegal (26,2). Peningkatan PAD harus menjadi perhatian utama pemerintah kabupaten dan kota dalam rangka peningkatan kinerja keuangan pemda. Penelitian oleh Kurniawan, dkk (2017) menunjukkan bahwa PAD memberikan pengaruh yang sejalan dengan kinerja keuangan pemda. Meningkatnya PAD berimpas pada meningkatkan kinerja keuangan pemda. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Aswar (2019). Penelitian yang menyangkal hasil penelitian tersebut, antara lain penelitian Putri dan Damayanti (2019) yang menyimpulkan PAD berpengaruh tidak searah dengan kinerja keuangan pada pemda di wilayah Sarbagita Provinsi Bali.

Seperti yang telah menjadi rahasia bersama, dana perimbangan (DP) sebagai dana pemberian dari pemerintah pusat masih menjadi tumpuan utama pemda dalam menjalankan pemerintahan. Anggaran dimaksudkan untuk pemerataan fiskal antar daerah ini, nampaknya membuat pemda terlena terhadap kewajibannya dalam menggali pendapatan lain diluar dana perimbangan ini. Menilik pada LRA tahun 2020, proporsi DP pada pemerintahan Kab/Kot Jawa Tengah menduduki 65% dari total pendapatan daerah. Hal ini mengindikasikan betapa tingginya ketergantungan daerah terhadap dana dari pusat. Gambaran buruknya, daerah tidak dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik tanpa adanya suntikan dana dari pusat.

Penelitian yang mengkonfirmasi bahwa DP memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pemda, antara lain penelitian oleh Simanullang (2013). Penelitian lainnya oleh Awwaliyah, dkk (2019) membawa hasil bahwa dana perimbangan mempengaruhi kinerja keuangan pemda secara positif. Sedangkan penelitian lain oleh Kurniawan, dkk (2017) menyatakan tidak adanya pengaruh *balanced fund* (DP) terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut dikarenakan DP masih didominasi oleh DAU. Pendapat ini selaras dengan oleh Aswar (2019), yaitu DP tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemda di Pulau Jawa.

Selain menilik dari sisi pendapatan, kinerja keuangan pemda juga dapat ditelusuri dari sisi pengeluaran (belanja). Belanja yang dikeluarkan secara efektif, efisien, dan ekonomis tentunya dapat membawa pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Kurang maksimalnya realisasi BD mengindikasikan tidak optimalnya penggunaan sumber daya guna mendorong kegiatan yang menjadi motor penggerak

perekonomian daerah. Berikut gambar proporsi alokasi BD pada Pemda Kab dan/atau Kota di Jawa Tengah untuk T.A 2020:



Source: Data olahan, DJPB Kanwil Jateng

Gambar 1.2. Proporsi belanja daerah Kab/Kot Jawa Tengah tahun 2020

Gambar 1.2 diatas, menggambarkan bahwa proporsi belanja daerah pada Pemda Kab/Kot di Jawa Tengah masih didominasi belanja pegawai. Terjadi kenaikan persentase belanja tak terduga sebesar 5,53% dari tahun 2019 yang hanya sebesar 0,43%. Lonjakan tersebut disebabkan karena adanya kebijakan penyesuaian dan realokasi anggaran guna menyukseskan program Penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). Armaja, dkk (2017) mengungkapkan BD memberikan pengaruh positif pada kinerja keuangan. Tingginya belanja yang dikeluarkan daerah selaras dengan kinerja keuangan yang dicapai daerah. Penelitian lain oleh Nugroho & Prasetyo (2018) menyangkal hasil penelitian sebelumnya, dimana hasil yang ia temukan adalah BD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Wabah *Corona disease* atau *Covid-19* yang mewabah Indonesia juga dunia membawa angin musibah pada semua sisi kehidupan, dimulai dari sisi kesehatan yang selanjutnya berdampak sisi ekonomi dan akhirnya menjangkau sisi sosial juga.

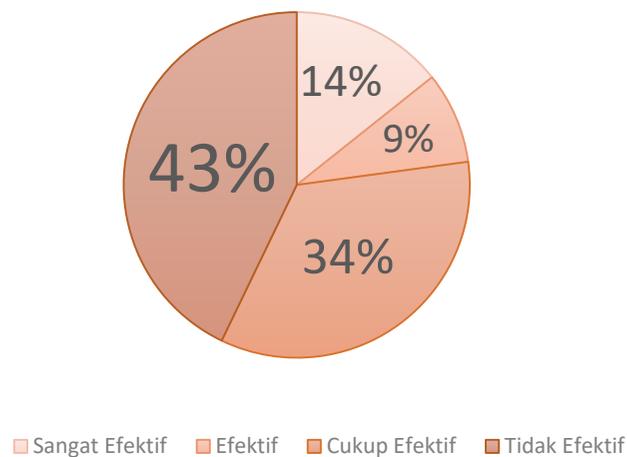
Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan berdasarkan *learning by doing* dikarenakan Pemerintah Indonesia tidak memiliki persiapan sama sekali untuk menghadapi wabah ini. Langkah awal menghadapi covid-19 yaitu dengan mengubah postur anggaran melalui realokasi anggaran.

Kebijakan realokasi anggaran diatur dalam Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2020. Instruksi tersebut menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk menutamakan penggunaan anggaran yang ada untuk kegiatan yang mendukung percepatan penanganan Covid-19. Merespon instruksi tersebut, terbitlah keputusan bersama Mendagri dan Menkeu tentang percepatan penyesuaian APBD tahun 2020. Didalamnya di instruksikan untuk melakukan penyesuaian target pajak dan retribusi daerah serta melakukan pemotongan belanja barang/jasa dan belanja pegawai sekurang-kurangnya sebesar 50%. Selanjutnya dana selisih tersebut dialokasikan untuk membiayai belanja bidang kesehatan, penyediaan jaringan sosial, dan penanganan dampak ekonomi dari wabah *Covid-19*. Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat melakukan fleksibilitas dan respon yang cepat atas kebutuhan anggaran kesehatan yang tajam. Kebijakan ini juga diteruskan hingga tingkat daerah agar beban penanganan *Covid-19* bisa ditanggung bersama.

Merespon instruksi dari pusat, pemerintah Jawa Tengah mengupayakan beberapa model kebijakan. Diantara kebijakan tersebut yaitu, mengalokasikan sebagian Dana Desa untuk BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) dan mengalokasikan anggaran Belanja tak terduga untuk mendukung Program PC PEN. Untuk wilayah Jawa Tengah sendiri, dengan total 35 pemda kota dan kabupaten mengalokasikan dana sebesar Rp. 4.536,70 miliar dalam kerangka belanja tak terduga.

Alokasi belanja tak terduga ini dikeluarkan guna meminimalisir dampak wabah Covid-19 baik pada lingkup kesehatan, maupun lingkup sosial dan ekonomi. Proporsi realisasi belanja tak terduga pada pemda kota dan kabupaten se Jawa Tengah digambarkan pada diagram lingkaran dibawah ini:

### Realisasi Belanja Tidak Terduga



Gambar 1.3. Proporsi realisasi BTT Kab/Kot Jawa Tengah tahun 2020

Dapat dilihat pada gambar 1.3, untuk kategori sangat efektif sebesar 14% diraih oleh pemda Kabupaten Pemasang, Kota Pekalongan, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Rembang. Sedangkan sebesar 43% lainnya tidak efektif. Penting untuk merealisasikan kebijakan ini semaksimal mungkin., sehingga penanganan kesehatan bisa berjalan maksimal, dampak perekonomian dapat diminimalisir, laju peningkatan kemiskinan dapat ditekan dan kinerja keuangan pemda dapat meningkat.

Penelitian oleh Edi Sudaryanto (2020) tentang strategi realokasi APBD membawa hasil bahwa kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran memberikan pengaruh negatif pada kinerja keuangan. Ini dikarenakan dalam kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran lebih didominasi oleh belanja konsumtif dibanding belanja modal. Belanja modal yang berfokus untuk pembangunan banyak yang tertunda bahkan hingga dibatalkan. Penelitian lainnya oleh Onibala, dkk (2021) menyatakan bahwa wabah Covid-19 menyebabkan penurunan kinerja keuangan, namun pengaruhnya tidak signifikan. Penelitian lain oleh Anas (2021), menunjukkan bahwa wabah Covid-19 tidak membawa pengaruh yang signifikan pada kinerja keuangan.

Penelitian ini berfokus pada kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan penggunaan variabel PAD, DP dan BD. Penggunaan ketiga variabel tersebut dikarenakan penilaian kinerja keuangan tidak hanya dilihat dari sisi pendapatan namun juga dari sisi pengeluaran (Thalib & Ekaningtias, 2019). Menanggapi wabah Covid-19 yang sedang terjadi, saya tertarik untuk mengetahui pengaruhnya pada kinerja keuangan terutama terkait kebijakan ekonomi yang disahkan. Maka dari itu, dalam penelitian ini ditambahkan variabel kebijakan realokasi anggaran sebagai pemoderasi untuk ketiga variabel yang telah disebutkan. Dari latar belakang diatas, maka judul penelitian ini adalah **“KEBIJAKAN REALOKASI ANGGARAN SEBAGAI PEMODERASI DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2020”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yakni:

1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah dana perimbangan (DP) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah belanja daerah (BD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah kebijakan realokasi anggaran memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah?
5. Apakah kebijakan realokasi anggaran memoderasi pengaruh dana perimbangan (DP) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah?
6. Apakah kebijakan realokasi anggaran memoderasi pengaruh belanja daerah (BD) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah;
2. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan (DP) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah;
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah (BD) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah;

4. Untuk mengetahui kemampuan kebijakan realokasi anggaran dalam memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah;
5. Untuk mengetahui kemampuan kebijakan realokasi anggaran dalam memoderasi pengaruh dana perimbangan (DP) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah;
6. Untuk mengetahui kemampuan kebijakan realokasi anggaran dalam memoderasi pengaruh belanja daerah (BD) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang diuraikan diatas, diharapkan penelitian ini akan memberikan kemanfaatan, antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai referensi penambah khasanah ilmu dibidang akuntansi sektor publik, khususnya dalam kaitannya dengan kinerja keuangan Pemda;
- b. Diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pengaruh antara variabel bebas (Pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan (PAD) dan Belanja Daerah (BD)) terhadap variabel terikatnya (kinerja keuangan pemerintah daerah), serta variabel moderasinya (kebijakan realokasi anggaran).

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi Pemda dalam mengevaluasi kinerja keuangannya, dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam membuat keputusan maupun kebijakan;
- b. Dapat bermanfaat dalam praktik penganggaran daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah;

- c. Berkontribusi dalam praktik akuntansi sektor publik di Indonesia pada masa mendatang.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan terbagi dalam lima bab yang saling berkorelasi, yakni:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang dilaksanakannya penelitian, yang kemudian dirumuskan permasalahan yang ada berupa pertanyaan kajian. Dari perumusan masalah tersebut maka dipaparkan apa yang menjadi tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini diakhiri dengan penjabaran sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dan telaah pustaka yang akan menjadi pondasi awal penelitian ini. Dari penjabaran tersebut akan terbentuk kerangka berpikir untuk memperjelas maksud penelitian yang dilakukan. Kemudian diputuskan hipotesis untuk diuji variabel-variabel penelitiannya.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi paparan metode penelitian yang dipakai dalam menyusun penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu menjelaskan tentang variabel penelitian, jenis data yang dipakai, dari mana sumber data, teknik dalam mengumpulkan data serta teknik analisis data yang akan diterapkan.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai objek penelitian, pengujian hipotesis penelitian dan uraian hasil analisis penelitian.

## BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan akhir penulisan penelitian yang menyimpulkan hasil penelitian. Selain itu disebutkan pula tentang hal-hal yang membatasi penelitian ini beberapa saran bagi pihak lain yang terkait.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga PAD bukanlah determinan kinerja keuangan pemerintah daerah, hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini ditolak;
2. Dana Perimbangan (DP) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga DP merupakan determinan kinerja keuangan pemerintah daerah, atau hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima;
3. Belanja Daerah (BD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga BD merupakan determinan kinerja keuangan pemerintah daerah, hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini diterima;
4. Kebijakan realokasi anggaran mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini diterima;
5. Kebijakan realokasi anggaran tidak mampu memoderasi pengaruh dana perimbangan (DP) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga hipotesis kelima (H5) yang diajukan dalam penelitian ini ditolak;

6. Kebijakan realokasi anggaran mampu memoderasi pengaruh belanja daerah (BD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga hipotesis keenam (H6) dalam penelitian ini diterima.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari kejelasan variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah dilihat dari sisi keuangan saja. Determinan kinerja keuangan daerah dari sisi non keuangan tidak dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, indikator kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini hanya berfokus pada indeks kemandirian fiskal (IKF). Terdapat banyak indikator kinerja keuangan daerah lainnya, namun tidak diungkap dalam penelitian ini, misalnya dengan menggunakan metode *value for money*.
2. Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada kebijakan realokasi anggaran, dengan indikator belanja tak terduga. Terdapat indikator lain yang dapat digunakan, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
3. Populasi penelitian ini hanya sebatas Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, sehingga kesimpulan ini belum dapat mengeneralisir keadaan Kabupaten dan Kota se-Indonesia yang sesungguhnya.

## **C. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

## 1. Implikasi Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi pengetahuan, khususnya dilingkup kinerja keuangan daerah. Penelitian selanjutnya dapat memunculkan variabel baru diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini, seperti realisasi pembangunan infrastruktur, untuk menganalisa pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggabungkan beberapa indikator kinerja keuangan lainnya, sehingga hasil yang diperoleh akan lebih luas cakupannya.

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menilik pada kebijakan realokasi anggaran, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperdalam lingkup penelitian terkait kebijakan realokasi anggaran ini. Bisa saja dengan meneliti pengaruh kebijakan realokasi anggaran terhadap wirausaha baru atau jumlah penduduk siap kerja (yang telah lulus dari program padat karya). Dengan harapan penelitian yang akan datang dapat memproyeksikan kelanjutan dari implementasi realokasi anggaran ini di tahun-tahun berikutnya.

## 2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja keuangan didaerahnya. Berdasarkan serangkaian uji yang telah dilaksanakan, didapatkan bahwa proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah jauh dibawah proposri Dana Perimbangan (DP). Diperlukan usaha yang maksimal dan konsisten oleh pemerintah daerah agar dapat meningkatkan proporsi PAD. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan

memanfaatkan DP untuk membiayai kegiatan eksplorasi dalam mencari sumber PAD lainnya. Selain itu, alokasi Belanja Daerah (BD) harus difokuskan untuk pembangunan daerah. Efek positif dari pemabnguanan infrastruktur daetah diantaranya akan meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Sehingga realisasi PAD dapat meningkat pula. Peningkatan proporsi PAD ini selanjutnya dapat turut andil dalam memperbaiki kinerja keuangan daerah, salah satunya melalui indikator kemandirian daerah. Sehingga daerah tidak lagi terlalu berpangkutangan pada pemerintah pusat.

Kebijakan realokasi anggaran bisa terus diterapkan diluar terkait penanganan wabah *Covid-19*, khususnya realokasi anggaran belanja daerah. Anggaran belanja untuk kegiatan yang tidak terlalu dibutuhkan dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Seperti anggaran belanja untuk acara gathering pejabat dan belanja pakaian diluar baju dinas dapat dialokasikan untuk kegiatan padat karya masyarakat. Kegiatan padat karya ini bisa menumbuhkan wirausaha baru sehingga mampu membuka lowongan pekerja. Otomatis hal tersebut akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan daerah serta menciptakan kesejahteraan masyarakat di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, d. (2017). Pengaruh Budgetary Slack Terhadap Kinerja SKPS dengan Komitmen Organisasi dan Kapasitas Individu sebagai Variabel Moderasi. *Patria Artha Journal of Accounting & Financial Reporting*, Vol. 1, No. 12, 135-146.
- Anas, M. (2021). Impact of Pandemic Covid-19 on Local Government Financial. *Jurnal of Southwest Jiaotong University*, Vol. 56, No. 3.
- Anasta, & Nengsih. (2019). Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal PROFITA: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 12, No. 1, 50-55.
- Andjarwati, d. (2021). Analysis of Local Own Revenue and Balancing Funds on The Financial Performance of Districts and Cities in The Region of East Java Province. *International Journal of Economics and Finance Studies*, Vol. 13, No. 1, 235-250.
- Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anynda, N. S., & Hermanto, S. (2020). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol 9, No. 10.
- Arifiyanti, & Ardiyanto. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Setelah adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1-13.
- Armaja, Ibrahim, R., & Aliamin. (2017). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Peimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168-181.
- Aswar, K. (2019). Financial Performance of Local Government in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*, Vol. 4, No. 6.
- Awwaliyah, d. (2019). The Effect of Original Income and Balance Funding on Regional Government Financial Performance. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, Vol. 1, No. 1, 25-46.
- Azis, Baharuddin, & Muchtar. (2020). Analisis Pajak Daerah Kota Makassar. *Journal of Management*, 1(1), 120-135.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Jakarta: BPK-RI. Retrieved from Laporan Hasil Pemeriksaan: <https://www.bpk.go.id>
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: PT Indeks.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Jateng. (2020). *Kajian Fiskal Regional Jawa Tengah Tahun 2020*. Retrieved from <https://djpb.kemenkeu.go.id/Kanwil/Jateng>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Square Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Edisi 2*. Semarang: BP-Unibersitas Diponegoro.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ishak, J. (2021). Covid-19: Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3).
- KEMENKEU DJPB Kanwil Jateng. (2020). *Kajian Fiskal Regional*.
- Kurniawati, d. (2017). Determinants of Financial Performance: Study of Local Governments in West Nusa Tenggara. *Jurnal STIE Mandala*, 1536-1560.
- Machmud, J., & Radjak, L. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 17-32.
- Mamesa, D. J. (1995). *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Marpaung, J. D. (2019). Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Deteksi Ilusi Fiskal. *Jurnal MAKSI*.
- Nugroho, T. R., & Prasetyo, N. E. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(1), 27-34.
- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(2).

- Pemerintah Republik Indoneisa. (2020). Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020. *Refocusing Kegiatan, Reallocating Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Undang Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (n.d.). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2012 . *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Putri, N., & Darmayanti, N. (2019). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen*, 8(5), 2834-2861.
- Rabbani, D. (2020). Public Trust Building Strategy terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19. *LEGISLATIF: Lembaran Gagasan Mahasiswa yang Solutg dan Inovatif*, 4(1).
- Simanullang, N. (2013). Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2012. *Umrah Journal of Accounting*, 1(1), 1-24.
- Statistik, B. P. (2020). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2020*. Semarang: BPS Jateng.
- Sudaryanto, E. (2020). Strategi Realokasi APBD Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah "X". *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 1 (1), pp. 235-240.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thalib, F., & Ekaningtias, D. (2019). The Effect of Original LG Revenue, Balancing Funds and Capital Expenditure on LG Financial Performance in Regencies in East Java Province. *The Indonesia Accounting Review*, 9(1), 39-40.
- Wibowo, I. &. (2021). Kebijakan Keuangan dan Siklus Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah untuk Penanganan Pandemi Covid-19. *JURNALKU*, 1(4).